

---

**INDONESIA 1945-2020: DEMOKRASI DAN CIVIL SOCIETY**

**Samson Ganda J. Silitonga**

Universitas Katolik Parahyangan

E-mail: samson.ganda@unpar.ac.id

---

Diterima:

**20 Juni 2021**

Direvisi:

**10 Juli 2021**

Disetujui:

**14 Juli 2021**

**Abstrak**

Diskursus demokrasi Indonesia periode 1946-1957 mendapat sebutan beraneka ragam dari perspektif akademik. Ahli-ahli menyebutnya demokrasi liberal, demokrasi parlementer, bahkan juga demokrasi konstitusional. Makna telaah demokrasi berdasarkan Hatta dan Supomo, Magnis Suseno mengisyaratkan demokrasi dan demokrasi Indonesia memiliki kesamaan sekaligus pula perbedaan. Tujuan dalam penelitian ini adalah menjelaskan demokrasi dan *civil society* dalam konteks Indonesia. Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan analisis kuantitatif berdasarkan survei dan menjangkau lebih dari 2600 jawaban responden terkait demokrasi dengan menyebar kuisioner melalui *google form*. Butir-butir yang dapat disimpulkan dari jawaban 2640 responden dan penelitian ini adalah: daya tarik demokrasi bagi masyarakat Indonesia tidak terlalu tinggi, tetapi patut diapresiasi. Bangsa Indonesia sudah cukup mengupayakan demokrasi, namun tidak berhasil. Ketidakterhasilan tersebut, yang paling mungkin adalah karena agama lebih penting dari demokrasi dan salah satu upaya mewujudkan demokrasi adalah sosialisasi sila-sila Pancasila di rumah ibadah. Musyawarah untuk mufakat tetap lebih dipentingkan dari teknologis, yang mana kebijakan negara harus lebih peduli pada masyarakat daripada elit politik. Kondisi pandemi COVID-19 seperti saat ini menyebabkan demokrasi seperti dilupakan dahulu. Difusi demokrasi internasional terhadap gerakan-gerakan demokratisasi di Indonesia berlangsung dalam 4 (empat) tipe penyikapan, adopsi, penyesuaian, penolakan dan persuasi.

**Kata kunci:** *Demokrasi, Diskursus, Ideologi*

**Abstract**

*The discourse on Indonesian democracy in the period 1946-1957 received various names from an academic perspective. Experts call it liberal democracy, parliamentary democracy, even constitutional democracy. The meaning of the study of democracy based on Hatta and Supomo, Magnis Suseno suggests that democracy and Indonesian democracy have similarities as well as differences. The purpose of this study is to explain democracy and civil society in the context of Indonesia. This research was conducted using quantitative analysis based on surveys and collected more than 2600 respondents' answers related to democracy by distributing questionnaires via google form. The points that can be concluded from the answers of 2640 respondents and this*

*research are: the attractiveness of democracy for the Indonesian people is not too high, but it should be appreciated. The Indonesian people have tried enough for democracy, but to no avail. This failure is most likely because religion is more important than democracy and one of the efforts to realize democracy is the socialization of the precepts of Pancasila in houses of worship. Deliberation for consensus remains more important than technology, in which state policy must care more about the community than the political elite. The current state of the COVID-19 pandemic has caused democracy to be forgotten. The diffusion of international democracy towards democratization movements in Indonesia takes place in 4 (four) types of attitude, adoption, adjustment, rejection and persuasion.*

**Keywords:** *Democracy, Discourse, Ideology*

## **Pendahuluan**

Akhir abad XX ditandai sebagai dekade demokratisasi. Samuel Huntington menyebutnya dekade Gelombang Demokratisasi Ketiga (Ladiqi & Wekke, 2018). Gerakan-gerakan pada dekade ini memunculkan demokrasi lahir di berbagai belahan dunia, termasuk juga di Indonesia (Susabun, 2020). Sistem pemerintahan otoriter mulai tergeser bahkan tenggelam, dan yang menonjol terjadi di Eropa Timur dan Amerika Selatan (Denny, 2021). Khusus di Indonesia, runtuhnya pemerintahan Orde Baru secara akademik dianggap membuka kesempatan untuk menelaah format politik yang diharapkan lapisan-lapisan masyarakat non elit (Mukmin, 2015). Format politik yang berjalan sejak Orde Soekarno (1957) hingga Maret 1967, sampai Mei 1998 dianggap gagal mengedepankan gagasan serta perilaku politik demokratis bagi sebuah negara sebesar dan se-majemuk Indonesia (Wijaya, 2014).

Format politik Orde Baru sepanjang 30 tahun lebih itu dicirikan oleh pelembagaan peran sosial politik militer, sistem perwakilan yang tanggung sekaligus semu, sistem kepartaian yang 'seolah terbuka' namun sebenarnya tertutup, penekanan sangat kuat terhadap sentralisasi pemerintahan dan proses pembangunan sosial yang berorientasi pertumbuhan ekonomi material (Rajab, 2004). Harus diakui, dengan format politik bercirikan itu negara ini berhasil menciptakan stabilitas politik yang relatif nyaman, dengan pertumbuhan ekonomi yang memadai pula dengan rerata 6-7 % pertahun. Bermodalkan itu pula kekuasaan di Republik Indonesia bertahan selama 6 periode, yang diinisiasi melalui pemilihan umum yang hasilnya telah dapat diprediksi sebelum proses berakhir (Purba et al., 2020).

Menjelang akhir 1980an sebetulnya telah muncul berbagai pertanyaan mendasar mengenai Indonesia dan sistem politik yang menaunginya (Afronyati, 2014). Sejak 1950an atau selama setengah abad; menunjukkan bahwa demokratisasi Indonesia sebenarnya telah diupayakan sejak Republik ini berdiri, dan makin kuat sejak pemerintahan Orde Baru menyatakan diri (1966/1967), tetapi masih kurang efektif melayani masyarakat Indonesia sesuai tujuan dan cita-cita negara. Pertanyaan-pertanyaan mendasar yang dimaksud: sejauh mana formasi politik Orde Baru telah mengantisipasi meningkatnya aspirasi dan tuntutan masyarakat atas transparansi politik, demokratisasi, HAM (Hak Asasi Manusia), *clean government*, pemerataan, dan termasuk pula implementasi Pancasila sebagai falsafah, ideologi dan sekaligus sistem nilai sosial (Soleman & Noer, 2017).

Berkaitan dengan berbagai pertanyaan tersebut, mereka yang menyadari bahwa sejak akhir dekade 1970an Indonesia sebetulnya telah dilanda globalisasi, juga menyodorkan

berbagai pertanyaan kritis terhadap kekuasaan mengenai fairness, transparansi serta hubungan negara–rakyat dan *Civil Society*. Pertanyaan yang juga menguat apakah format politik Orde Baru telah cukup berhasil membawa Indonesia menuju masyarakat tinggal landas atau minimal mendekati formasi Negara-Bangsa (*Nation-State*).

Arus deras gelombang dan tuntutan demokratisasi di Indonesia akhir abad XX memang cukup tepat diarahkan pada sistem pemerintahan Negara yang otoriter, namun menjadi fakta sosiologis yang tidak dapat dikesampingkan pula bahwa tuntutan demokratisasi juga terarah pada kondisi-kondisi fundamental empirik masyarakat Indonesia.

Pengakuan kedaulatan dari Kerajaan Belanda memunculkan praktik berdemokrasi terutama dihiasi tingkah laku parlementaris dengan kekuatan oposisi yang masif hingga menimbulkan turbulensi seolah tiada henti (Mukmin, 2015). Pergantian (personil) kabinet bisa terjadi secara tiba-tiba (mendadak) dan berbagai konflik cenderung tidak terselesaikan antara kelompok nasionalis–sekuler dengan nasionalis–agama dan sosialis versus agama. beberapa daerah sering terjadi kekacauan dan memaksa Soekarno memakai kekuatan militer, yang secara langsung maupun tidak menimbulkan *chaos* atau pertikaian antar elit, baik secara terbuka maupun tertutup. Kondisi-kondisi inilah yang membuat Soekarno menyimpulkan bahwa gagasan Demokrasi Barat, dengan penekanan pada aspek parlementer yang bebas, sama sekali tidak sesuai dengan kultur Bangsa Indonesia (Priowidodo, 2018).

Mundurnya Drs. Mohammad Hatta dari posisi wakil presiden pada akhir tahun 1956 seperti menenggelamkan demokrasi dari panggung utama politik Indonesia. Tetapi, kepala negara dan kepala pemerintahan kala itu, Soekarno, memberi isyarat bahwa pengunduran diri wakil presiden bukanlah sesuatu yang harus disesalkan. Soekarno seperti melihat pengunduran diri Hatta patut dicegah, hal tersebut merupakan masalah Dwi Tunggal kekuasaan, tetapi bukan persoalan yang menggoncang sistem politik kenegaraan, apalagi meremukkan sendi demokrasi. Sebab perjalanan bangsa sendiri masih sangat belia serta perlu dan wajar jika dibetulkan ulang dalam koridor. Melalui pidato tersebut, setidaknya 2 (dua) gagasan pokok dapat dipetik. Pertama, *founding father* Indonesia sendiri sebetulnya merasa tidak puas terhadap praktik demokrasi dalam sistem politik Indonesia pasca pengakuan kedaulatan. Kedua, terungkap pula bahwa Indonesia diyakini mempunyai pondasi demokrasi yang sesuai dengan karakter kultural dan psikologi sosial rakyat Indonesia sendiri (Tania, 2019).

Diskursus demokrasi Indonesia periode 1946-1957 mendapat sebutan beraneka ragam dari perspektif akademik. ahli-ahli menyebutnya demokrasi liberal, demokrasi parlementer, bahkan juga demokrasi konstitusional (Hamzani, 2014). Boyd R. Campton menjelaskan, situasi 1950-1955, bahkan sebelumnya (1945-1949), merupakan kondisi-kondisi yang wajar dalam sebuah negara baru bebas (merdeka) dan gagasan demokrasi yang bertebaran itu harus dilihat sebagai proses penyempurnaan konstiksi pemerintahan. Sedangkan Magnis Suseno, menyatakan Indonesia pada periode 1946-1957 belum sepenuhnya menjalankan demokratisasi sesuai gagasan inti kerakyatan yang merupakan Roh Demokrasi (Khairazi, 2015).

Makna telaah demokrasi berdasarkan Hatta dan Supomo, Magnis Suseno mengisyaratkan demokrasi dan demokrasi indonesia memiliki kesamaan sekaligus pula perbedaan. Hatta tentu tidak menolak demokrasi (Barat), tetapi harus dilengkapi dengan demokrasi Indonesia yang mencakup ekonomi kerakyatan (Ashari, 2020). Supomo menolak demokrasi (Barat) sepenuhnya, demikian Magnis-Suseno. Bahkan irisan pandangan kedua tokoh itu, kata Magnis-Suseno, sama-sama tidak terealisasi. Dalam kata-kata Suseno sendiri, “Puncak kehidupan demoratis Republik muda sekaligus merupakan permulaan kemerosotannya”.

Penelitian ini memiliki hubungan serupa dalam buku (Hikam & Magnis-Suseno, 1996), dimana dalam buku tersebut menjelaskan demokrasi dan *civil society*, tetapi penelitian ini ditambahkan analisis kuantitatif berdasarkan survei dan tidak sekadar analisis politik. Tujuan dalam penelitian ini adalah menjelaskan demokrasi dan *civil society* dalam konteks Indonesia. Manfaat menghubungkan demokrasi dan *civil society* dalam konteks Indonesia yaitu menegaskan, persoalan pertama sehubungan dengan diskursus demokrasi Indonesia adalah ambiguitas sudut pandang. Berdasarkan penelusuran sejarah kita teramat mudah menemukan jarak antara historisitas demokrasi yang umum (sekaligus universal) dengan gagasan kontekstual yang hendak dikembangkan. Tarik-manarik inilah yang melahirkan pertanyaan, bagaimana sesungguhnya formulasi demokrasi yang tepat untuk Indonesia. Kiblat mana yang harus dipilih, demokrasi global atau usaha kontekstualisasi dengan menggali tradisi kultural yang tersedia. Atau, mungkinkah memperoleh semacam “jalan ketiga” bagi demokrasi Indonesia.

1. Artikel ini mengajukan pertanyaan, apakah tradisi berdemokrasi di Indonesia kekuasaan Soekarno maupun Soeharto masih dalam ambiguitas di atas.
2. Jika bukan, bagaimanakah penyelenggaraan tradisi Demokrasi di Indonesia 1998 – 2020 setelah era Soekarno dan Soeharto dan bagaimana pula tradisi itu memberikan artikulasi bagi masyarakat Indonesia sendiri.

### Metode Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan analisis kuantitatif berdasarkan survei dan menjangkau lebih dari 2600 jawaban responden terkait demokrasi dengan menyebar kuisioner melalui *Google Form*: <https://forms.gle/dvUino3nKUNj54CU8>. Hasil dari jawaban-jawaban responden tersebut kemudian diinterpretasikan.

### Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 60% responden tinggal di kota besar. Kota-kota besar memang berkembang pesat dan tahun 2018 Indonesia menyelenggarakan *Asian Games* dengan meriah yang membuktikan bahwa arus urbanisasi meningkat akhir-akhir ini. Responden dalam penelitian ini 60%, adalah anak muda 18-24 tahun. Hasil tersebut menunjukkan bahwa responden dalam penelitian ini adalah mereka yang berusia dewasa awal atau ambang usia produktif. Pengukuran dari tingkat pendidikan, 1919 orang responden mengakui SMA sederajat, 575 responden mengakui sarjana, sebanyak 74 responden mengaku berpendidikan magister (S2) dan hanya 53 responden yang mengaku telah menempuh jenjang doktor (S3), profesi sebanyak 64,4% responden mengaku wirausaha, 13,6% responden mengaku pekerja seni, 11,7% responden mengaku sebagai guru dan dosen, dan hanya 10,3% mengaku ASN (termasuk TNI – Polri). Hasil tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar responden adalah pekerja swasta yang tidak terikat kepada negara dalam hal mata pencariannya

Terkait karakteristik responden, analisis dalam penelitian ini membuktikan bahwa daya tarik terhadap demokrasi tidak terlalu tinggi karena menurut Ted Fishman, demokrasi yang baik adalah bila sebagian besar responden tinggal di kota menengah, berpendidikan rata-rata, berafiliasi swasta atau tanpa negara.

Pertanyaan dilontarkan terkait apakah mengikuti pilpres terakhir (2019), sebanyak 65,4% responden menjawab ya dan angka ini sangat besar. Pertanyaan yang sama diajukan tentang pemilihan gubernur, ternyata 51,8% menjawab ya dan menurut kami ini membuktikan demokarsi kurang menarik. Pertanyaan lain seperti apakah arti demokrasi, sebanyak 8,6% responden menjawab demokrasi adalah sistem negara, dan hanya 30,2% menjawab partisipasi rakyat. Sebanyak 15,4% menjawab demokrasi adalah kualitas

partisipasi rakyat dan sebanyak 7,9% menjawab bahwa demokrasi adalah suara terbanyak, hanya 37,8% menjawab demokrasi adalah kebebasan rakyat. Hal tersebut menunjukkan, jawaban responden bukan soal kualitas tetapi partisipasi rakyat. Jika partisipasi digabungkan dengan kebebasan, maka inilah jawaban responden terbesar.

Jawaban responden pada arti demokrasi juga harus dihubungkan dengan pertanyaan apakah jika responden mengikuti pilpres atau pilgub, akan memilih yang dipilhkan partai politik atau pilihan sendiri. Lebih dari 60% responden menjawab pilihan sendiri, bukan berdasarkan partai politik. Hal ini menunjukkan sebagian responden digerakkan oleh subjektifitas, atau bahkan intersubyetifitas. Ini mirip paradigma milenial, tetapi harus dibuktikan lebih spesifik. Selain itu harus dikatakan bahwa jawaban responden tidak bersifat prosedural. Artinya, demokrasi yang diharapkan responden bukanlah demokrasi formalitas.

Jawaban responden atas pertanyaan nomor berikutnya cukup mengejutkan. Sekitar 60,7% jawaban responden menunjukkan bahwa indonesia sudah berupaya mewujudkan demokrasi meski kurang berhasil. Ini dihubungkan dengan masyarakat indonesia beragama islam (29,3%) yang menolak demokrasi (28,3%) dan ini terjadi tahun 2021 atau 23 tahun setelah reformasi politik. Jawaban responden barusan agaknya sinkron dengan pertanyaan barusan, yakni 30,2% + 28,6 menjawab bahwa sosialisasi pancasila sebaiknya berlangsung pada rumah ibadah dan musyawarah untuk mufakat tetap lebih penting tinimbang pilihan-pilihan teknologis lain.

Demokrasi tetap dianggap penting, 46,3% responden mengemukakan bahwa sia-sia untuk bertahan dengan gagasan itu karena demokrasi hanya akan bertahan sebagai pikiran saja dan itupun terjadi secara internasional semata (36,7), tidak pada skala nasional. Tidak boleh dilupakan bahwa pandemi covid-19 tengah mewabah dan mayoritas responden menjawab supaya demokrasi dilupakan saja, meski 47% lebih menganggap demokrasi masih layak dipercaya sebagai sistem. Apakah karena demokrasi tidak mempunyai alternatif lain yang sebanding? Akhirnya, 47,7% responden mengaku mengerti *civil society*. Meski kurang, angka itu masih lebih baik dibanding perkiraan kami kurang dari 30%.

Inilah butir-butir yang dapat disimpulkan dari jawaban 2640 responden itu:

1. Daya tarik demokrasi bagi masyarakat indonesia tidak terlalu tinggi, tetapi patut diapresiasi
2. Bangsa indonesia sudah cukup mengupayakan demokrasi, namun tidak berhasil
3. Ketidak-berhasilan tersebut, yang paling mungkin adalah karena agama lebih penting dari demokrasi
4. Salah satu upaya mewujudkan demokrasi adalah sosialisasi sila-sila Pancasila di rumah ibadah
5. Musyawarah untuk mufakat tetap lebih dipentingkan dari teknologi, yang mana kebijakan negara harus lebih peduli masyarakat daripada elit politik.
6. Kondisi pandemi covid-19 seperti saat ini menyebabkan demokrasi dilupakan dulu.

Bagi Anders Uhlin, difusi demokrasi internasional terhadap gerakan-gerakan demokratisasi di Indonesia berlangsung dalam 4 (empat) tipe penyikapan, adopsi, penyesuaian, penolakan dan persuasi (Umar, 2016). Keempat tipe ini sekaligus menjadi refleksi bagaimana orang Indonesia melihat dinamika demokratisasi global, lalu dikomparasi dengan pengalaman pribadi sendiri.

Tipe adopsi, ditunjukkan dengan kuatnya rujukan terhadap gagasan-gagasan barat tentang indonesia sebagai titik pandang gerakan demokrasi. Pada intinya, kebutuhan demokratisasi di indonesia merupakan refleksi bagi gagasan demokrasi liberal.

Tipe penyesuaian (*adjustment*), berisi pandangan yang menekankan bahwa kultur dan tradisi bangsa indonesia memiliki kemampuan menyerap nilai-nilai demokrasi dalam



pengertian barat. Sekaligus terdapat kemungkinan memajukan tradisi untuk kemudian diinkorporasikan dengan nilai-nilai demokrasi barat. Tipe penyesuaian ini, oleh banyak pihak, dianggap sebagai tipologi yang paling terlupakan dari seluruh periode diskursus demokrasi Indonesia.

Tipe penolakan (*refection*), merupakan untuk menyebut sikap-sikap yang menolak beberapa ide demokrasi barat, salah satunya menolak kapitalisme sebagai manifestasi kebebasan individu. Bidang ekonomi, kapitalisme dianggap sebagai manifestasi demokrasi. Contoh *refection* lain adalah penolakan terhadap self determination karena tidak sesuai konsep NKRI. Sejak Konferensi Meja Bundar (KMB) pada 1949, Soekarno menolak Papua terpisah dari NKRI, dan mengusahakan pengembaliannya pada 1961, lalu diperkuat lagi oleh Soeharto (1969).

Tipe Persuasi, merupakan sikap yang memberi kesan positif terhadap Demokrasi Global atau demokratisasi internasional. Terkandung usaha-usaha mengkomparasikan pengalaman negara-negara Asia lain (seperti Malaysia, Singapura, Jepang dan Korea Selatan) yang menghasilkan kesimpulan bahwa tanpa demokrasi, Indonesia tidak akan lebih baik

### **Kesimpulan**

Butir-butir yang dapat disimpulkan dari jawaban 2640 responden dan penelitian ini adalah daya tarik demokrasi bagi masyarakat Indonesia tidak terlalu tinggi, tetapi patut diapresiasi. Bangsa Indonesia sudah cukup mengupayakan demokrasi, namun tidak berhasil. Ketidak-berhasilan tersebut, yang paling mungkin adalah karena agama lebih penting dari demokrasi dan salah satu upaya mewujudkan demokrasi adalah sosialisasi sila-sila Pancasila di rumah ibadah. Musyawarah untuk mufakat tetap lebih dipentingkan dari teknologis, yang mana kebijakan negara harus lebih peduli pada masyarakat daripada elit politik. Kondisi pandemi covid-19 seperti saat ini menyebabkan demokrasi dilupakan dulu. Difusi demokrasi internasional terhadap gerakan-gerakan demokratisasi di Indonesia berlangsung dalam 4 (empat) tipe penyikapan, adopsi, penyesuaian, penolakan dan persuasi.

### **Bibliografi**

- Afronyati, Lies. (2014). Analisis ekonomi politik sertifikasi halal oleh Majelis Ulama Indonesia. *JKAP (Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik)*, 18(1), 37–52.
- Ashari, Aan Nur Hasim. (2020). *Pemikiran Mohammad Hatta tentang ekonomi kerakyatan perspektif ekonomi Islam Mohammad Abdul Mannan*. IAIN PONOROGO.
- Denny, J. A. (2021). *Jatuhnya Soeharto dan transisi demokrasi Indonesia*. Jakarta: Cerah Budaya Indonesia.
- Hamzani, Achmad Irwan. (2014). Menggagas Indonesia Sebagai Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya. *Yustisia Jurnal Hukum*, 3(3), 137–142.
- Hikam, Muhammad A. S., & Magnis-Suseno, Franz. (1996). *Demokrasi dan Civil Society*. Lp3es Jakarta.
- Khairazi, Fauzan. (2015). Implementasi demokrasi dan hak asasi manusia di Indonesia. *INOVATIF/ Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 72–94.
- Ladiqi, Suyatno, & Wekke, Ismail Suardi. (2018). Gambaran Demokrasi, Demokrasi, dan Perkembangan. In *Gawe Buku*. Yogyakarta: Gawe Buku.
- Mukmin, Ulul. (2015). *Kontribusi Organisasi Kepemudaan Ampu Dalam Penguatan Basis Massa Partai Golkar di Jawa Tengah*. Universitas Negeri Semarang.

- Priowidodo, Gatut. (2018). Komunikasi Politik: Memahami Dari Sisi Kepribadian dan Pemikiran Politik Soekarno dan Soeharto. In *Komunikasi Politik: Memahami Dari Sisi Kepribadian dan Pemikiran Politik Soekarno dan Soeharto*. Depok: PT Rajawali Pers.
- Purba, Bonaraja, Sudarmanto, Eko, Syafii, Ahmad, Nugraha, Nur Arif, Zaman, Nur, Ahdiyati, Madya, & Umarama, Ariyanto. (2020). *Ekonomi Politik: Teori dan Pemikiran*. Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Rajab, Budi. (2004). Negara Orde Baru: Berdiri di Atas Sistem Ekonomi dan Politik yang Rapuh. *Sosiohumaniora*, 6(3), 182.
- Soleman, Mochdar, & Noer, Mohammad. (2017). Nawacita sebagai strategi khusus Jokowi periode Oktober 2014-20 Oktober 2015. *Politik*, 13(1).
- Susabun, Antonius Oktaviano. (2020). *Problematisasi Demokrasi Dalam Dinamika Politik Lokal Di Indonesia Post-Soeharto Dan Alternatif Gerakan Kewarganegaraan Aktif*. STFK Ledalero.
- Tania, Putri. (2019). *Perspektif Abdurrahman Wahid terhadap Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia*. UIN Raden Intan Lampung, Lampung.
- Umar, Ahmad Rizky Mardhatillah. (2016). Dari Negara Islam ke Politik Demokratis: Wacana dan Artikulasi Gerakan Islam di Mesir dan Indonesia. *Jurnal Masyarakat Dan Budaya*, 18(1), 1–18.
- Wijaya, Arif. (2014). Demokrasi dalam Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia. *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*, 4(1), 136–158.



**This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.**